

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
(STUDI KASUS KOMPARASI KINERJA BUPATI KABUPATEN JAYAPURA PERIODE
2012 -2016 DAN 2017-2019)**

Transna Putra Urip¹

transnaputra@feb.uncen.ac.id

Herlisya Fernilita Patty²

herlisyafernilitapatty@gmail.com

ABSTRACT

This research was compiled with the aim of knowing and analyzing the financial performance of the Regional Government of Jayapura Regency in 2012–2019 and knowing whether there is a difference between the performance of the Regional Head of Jayapura Regency in periods 1 (2012–2016) and 2 (2017–2019) held by Mr. Matthew Awoitauw, S.E., M.Sc. Data analysis used financial ratios, namely the ratio of regional financial independence, the ratio of regional financial dependence, the ratio of effectiveness of local original income, and the ratio of the degree of decentralization, in addition to using the average different test. The research results show that (1) the ratio of regional financial independence shows an average value of 7.38% (instructive relationship pattern), and (2) the results of the t-test show that there is no difference between the performance of periods 1 and 2. (3) The ratio of regional financial dependence shows an average value of 90.80% (a very high category), and the results of the t-test show that there is no difference between performance in periods 1 and 2. (4) The ratio of effectiveness of regional original income shows an average value of 95.15% (this category is quite effective), and the t-test shows that there is a difference in the performance of regional heads between periods 1 and 2. (5) The ratio of degrees of decentralization shows an average value of 6.70% (very poor category), and the t-test shows that there is no difference between the performance of regional heads in periods 1 and 2.

Keywords: *financial performance, financial ratios, period, differences*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan suatu daerah menjadi salah satu bagian yang mengalami perubahan yang mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri, merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah peraturan pemerintah.

Wewenang pembangunan dari pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya termasuk sumber daya finansial. Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka dengan adanya pemberian hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus sendiri kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah dituntut agar dapat meningkatkan kinerja pada semua bidang termasuk dalam pengelolaan keuangannya. Dengan demikian perlu dilakukannya pengukuran kinerja terhadap pemerintah daerah tersebut.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi

keuangan daerah dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pemerintah daerah yang menjadi pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya agar dilihat dan dinilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik atau kurang baik. Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan analisis rasio. Penelitian ini akan dilakukan pada pemerintahan Kabupaten Jayapura.

Kabupaten Jayapura pada periode tahun 2012 sampai dengan 2019, dipimpin oleh Bapak Matius Awoitauw, S.E., M.Si, dimana periode pertama kepemimpinan adalah tahun 2012 sd 2016 dan periode kedua adalah tahun 2017 sd 2022. Namun dalam pembahasan ini periode kedua adalah tahun 2017 sd 2019 sesuai tahun datanya.

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Jayapura menunjukkan peningkatan yang besar dimana pada tahun 2012 sebesar Rp. 732,1 miliar dan pada tahun 2019 telah mencapai Rp. 1,34 triliun yang menunjukkan peningkatan sebesar 84,01%. Sedangkan Belanja daerah pada tahun 2012 sebesar Rp.786,8 miliar dan pada tahun 2019 telah mencapai Rp.1.24 triliun, yang menunjukkan peningkatan sebesar 58,34%. Dari gambaran ini memperlihatkan bahwa pada periode tahun 2012 sd 2019 peningkatan pendapatan daerah lebih besar dibandingkan peningkatan belanjanya. Jika dilihat gambaran peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012 sebesar Rp.32,5 miliar dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 103,44 miliar. Peningkatan PAD sebesar 217,8% tentunya sangat menggembirakan dan menunjukkan adanya upaya lebih dalam mencoba meningkatkan kinerja keuangan dari sisi pendapatan yang lebih baik.

Dengan uraian diatas maka penelitian ini membahas kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, dengan penekanan pada perbandingan kinerja keuangan daerah pada periode kepemimpinan pertama dan periode kepemimpinan kedua. Secara khusus pembahasan berfokus pada kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura pada periode satu dan dua dari kepala daerah dan ada tidaknya perbedaan yang signifikan kinerja pada periode satu dan dua dari kepala daerah mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2019.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, dengan mengambil data di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Jayapura.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data Pendapatan Asli Daerah, data pendapatan daerah, data dana transfer, data dana belanja dan data-data lainnya sesuai kebutuhan data dalam penelitian ini.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yang diperoleh melalui dokumen yang sudah ada baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik dokumentasi (kepustakaan). Data ini diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2012-2019.

Tabel 1.
Instrumen Penilaian APBD Berkualitas

Indikator Dan Penilaian	Min	Max
1) Ketepatan waktu penetapan APBD-Induk	1	3

Indikator Dan Penilaian	Min	Max
Tepat Waktu = 3		
Tidak Tepat Waktu = 1		
2) Opini BPK atas LKPD	1	3
WTP = 3		
WDP = 2		
TMP = 1		
3) Kinerja Pendapatan Daerah	1	3
Efektifitas Pendapatan Daerah :	0,5	1,5
> 80% = 1,5		
60 - 80% = 1		
< 60% = 0,5		
Kemandirian Fiskal :	0,5	1,5
> 75% = 1,5		
50 - 75% = 1		
< 50% = 0,5		
4) Proporsi Belanja Daerah	1	3
Belanja pegawai :	0,5	1,5
< 50 % = 1,5		
50% = 1		
> 50% = 0,5	0,5	1,5
Belanja modal :		
> 30% = 1,5		
30% = 1		
< 30% = 0,5		
5) Mandatory Spending	1	3
Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan :	0,5	1,5
> 20% = 1,5		
10 - 20% = 1		
< 10% = 0,5		
Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan :	0,5	1,5
> 10% = 1,5		
5 - 10% = 1		
< 5% = 0,5		
6) Daya Serap Belanja	1	3
> 90% = 3		
60 - 90% = 2		
< 60% = 1		
7) Efektifitas Belanja terhadap IPM dan Kemiskinan	1	3
Elastisitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi :	0,5	1,5
Elastis ($E > 1$) = 1,5		
Cukup Elastis ($0,70 < E < 1$) = 1		
In Elastis ($E < 0,70$) = 0.5		
Elastisitas Terhadap Kemiskinan :	0,5	1,5
Elastis ($E < -1$) = 1,5		
Cukup Elastis ($-0,70 > E > -1$) = 1		

Indikator Dan Penilaian	Min	Max
In Elastis ($E > -0,70$) = 0.5		
8) Rata-rata capaian kinerja belanja program	1	3
> 90% = 3		
60 - 90% = 2		
< 60% = 1		
Total Skor	8	24

Selanjutnya, untuk menilai kualitas APBD pada tahun tertentu digunakan rasio antara total skor aktual dengan total skor harapan yaitu :

$$K_t = \frac{TS_A}{TS_H} \times 100$$

dimana K_t adalah nilai kualitas APBD pada tahun ke-t; TS_A adalah total skor aktual; dan TS_H adalah total skor maksimum yang diharapkan.

Nilai K_t berada dalam interval $0 \leq K_t \leq 100$, yang selanjutnya dikategorikan dalam 5 (lima) kriteria. Dalam hal ini, dengan mengadopsi penilaian evaluasi kinerja yang dimuat pada Permendagri 86 Tahun 2017 ditetapkan kriteria penilaian APBD Berkualitas sebagai berikut :

Tabel 2.
Interval Penilaian dan Kriteria Kualitas APBD

No	Interval Nilai Kualitas	Kriteria Penilaian Kualitas
1.	$91\% \leq 100\%$	Berkualitas
2.	$76\% \leq 90\%$	Cukup Berkualitas
3.	$66\% \leq 75\%$	Kurang Berkualitas
4.	$51\% \leq 65\%$	Sangat Kurang Berkualitas
5.	$\leq 50\%$	Tidak Berkualitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Pendapatan Daerah

(a) Struktur Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD-nya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya dalam mengoptimalkan kemampuan daerahnya dengan menggali setiap potensi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Namun, dalam implementasinya kontribusi PAD masih relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semestinya dana untuk membiayai pembangunan daerah dapat digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membelanjai urusan rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut. Berikut ini tabel komposisi pendapatan daerah Kabupaten Mimika.

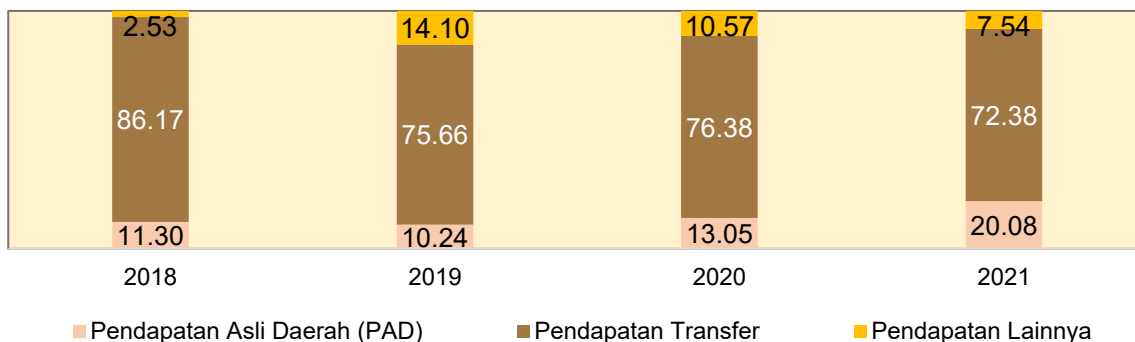
Tabel 3.
Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021
(Dalam milyar Rp)

Uraian	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN DAERAH	3.027,52	3.035,21	2.386,41	4.439,35
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	342,13	310,71	311,46	891,29
• Pajak Daerah	179,03	201,73	211,7	299,58
• Retibusi Daerah	16,86	13,24	19,08	18,67
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,56	4,42	5,01	468,14
• Lain-Lain PAD yang Sah	143,68	91,32	75,67	104,9
Pendapatan Transfer	2.608,80	2.296,4	1.822,69	3.213,29
Pendapatan Lainnya	76,59	428,1	252,26	334,77
• Pendapatan Transfer Antar Daerah	76,59	428,1	219,19	301,02
• Pendapatan Hibah	-	-	33,07	33,75
Lain-lain Pendapatan yang sah	-	-	-	-

Sumber : SIKD, 2022 (data diolah)

Kontribusi pendapatan transfer dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Mimika selama ini masih sangat dominan, rata-rata mencapai 77,65% per tahun selama periode 2018-2021, dengan kecenderungan yang menurun. Berikut gambaran struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021.

Gambar 1.
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021
(dalam %)

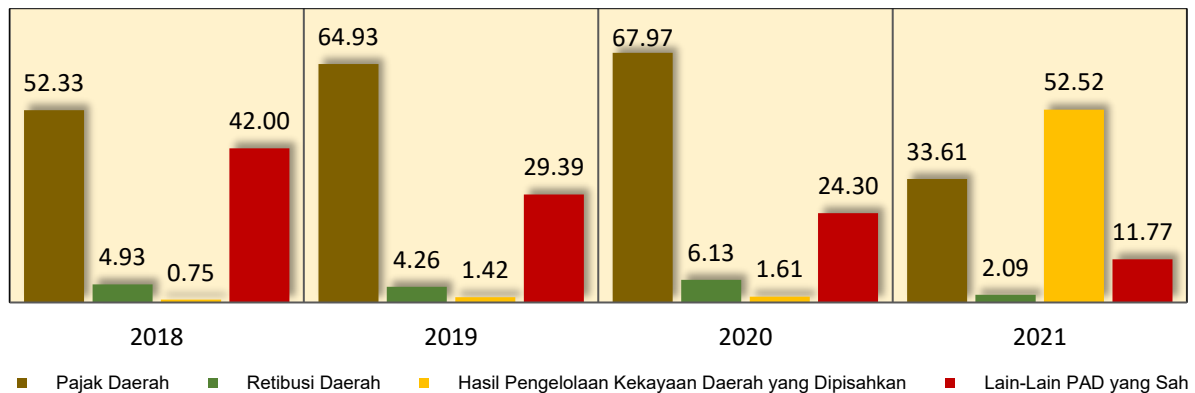


Sumber : SIKD, 2022 (data diolah)

Bila dilihat dari Gambar 1 di atas kontribusi pendapatan transfer masih tinggi. Sedangkan gambaran pendapatan transfer setiap tahun mengalami penurunan hingga mencapai 72,38% pada tahun 2021. Walaupun porsi PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk kontribusi pendapatan lainnya sangat fluktuatif, tetapi pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 14,10%.

Untuk PAD, selama tahun 2018-2020 peranan Pajak Daerah sangat besar, rata-rata mencapai 61,74% per tahun. Namun di tahun 2021, peranan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan melonjak tinggi melampaui penerimaan pajak, yaitu sebesar 52,52%. Ini terjadi karena pemerintah kabupaten mendapat deviden atau bagi hasil yang sangat besar dari PT. Freeport Indonesia sebanyak Rp. 462,32 milyar (BPK, 2021). Selengkapnya lihat Gambar 2 berikut.

Gambar 2.
Struktur PAD Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021
(dalam %)



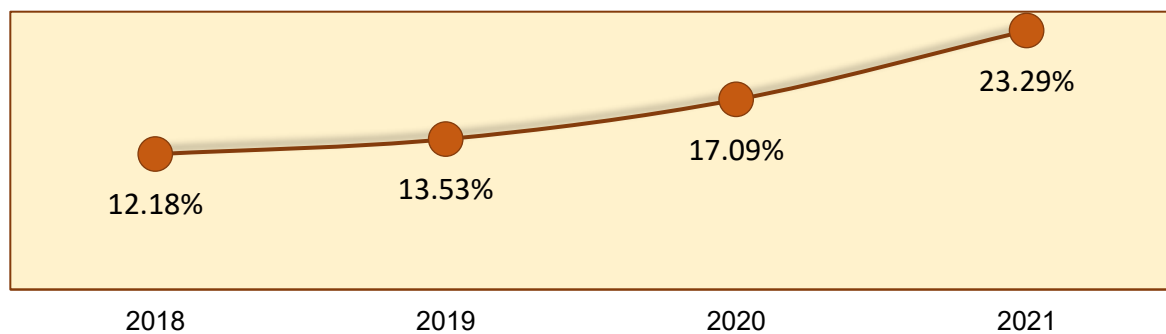
Sumber : SIKD, 2022 (data diolah)

(b) Kemandirian Fiskal

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Mimika cenderung meningkat, terakhir di tahun 2021 mencapai 23,29%. Ini mengindikasikan Kabupaten Mimika mampu meningkatkan potensi PAD yang ada setiap tahunnya. Namun demikian, karena angka rasionya masih dibawah 50%, berarti peran pemerintah pusat masih dominan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3.
Kemandirian Fiskal Tahun 2018-2022
(dalam %)



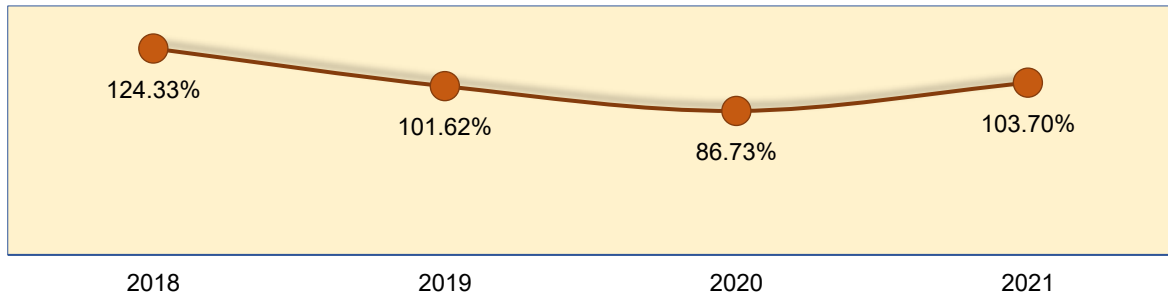
Sumber : SIKD, 2022 (data diolah)

(c) Efektifitas Pendapatan Daerah

Ruang fiskal bisa juga muncul dari peningkatan pendapatan di berbagai sektor dan penurunan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, efektifitas penggunaan anggaran di daerah juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Pemerintah daerah diharapkan memiliki terobosan untuk memanfaatkan ruang fiskal yang ada guna memacu pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Kemampuan pemerintah kabupaten mimika untuk merealisasikan pendapatan daerah terlihat sangat baik setiap tahunnya. Kondisi ini tercermin dari kecenderungan efektifitas pendapatan daerah yang selalu diatas 100%. Terakhir di tahun 2021 mencapai 103,70%, yang artinya sangat efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah.

Gambar 4.
Tingkat Efektifitas Tahun 2018-2022
(dalam %)



Sumber : SIKD, 2022 (data diolah)

Dari Gambar 4 di atas, Pemerintah Kabupaten Mimika mempunyai ruang yang cukup luas dalam memenuhi kebutuhan daerahnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Terkait dengan hal tersebut stimulus berupa kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif sangatlah diharapkan. Sektor riil seperti perdagangan dan perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang selama ini masih belum optimal, harus diberi dukungan kebijakan dari pemerintah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika.

2. Kinerja Belanja Daerah

(a) Struktur Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Selama tahun 2018-2020 struktur belanja daerah Kabupaten Mimika dominan pada Belanja Barang dan Jasa. Di tahun 2021 terjadi perubahan struktur, dimana belanja modal relatif mendominasi (32,50%) atau sebesar Rp 1,154 miliar.

Tabel 4.
Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021
(dalam milyar Rp)

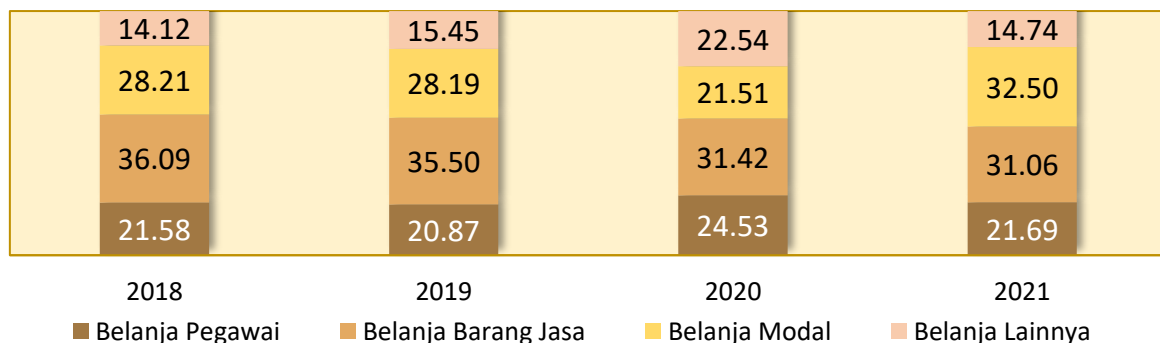
Uraian	2018	2019	2020	2021
BELANJA DAERAH	2.620,71	2.910,25	2.994,97	3.551,56
• Belanja Pegawai	565,62	607,27	734,58	770,49
• Belanja Barang Jasa	945,76	1.033,05	941,13	1.103,18
• Belanja Modal	739,24	820,34	644,3	1.154,33
• Belanja Lainnya	370,09	449,59	674,96	523,56

Uraian	2018	2019	2020	2021
a. Belanja Bunga	11,52	-	-	16,46
b. Belanja Subsidi	2,98	-	-	-
c. Belanja Hibah	133,86	140,55	137,82	110,09
d. Belanja Bantuan Sosial	29,2	29,51	1,07	42
e. Belanja Tidak Terduga	7,5	9,35	226,36	0,36
f. Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
g. Belanja Bantuan Keuangan	185,03	270,18	309,71	354,65

Sumber : SIKD, 2022 (data diolah)

Pemerintah Kabupaten Mimika dapat dikatakan telah patuh untuk mengalokasikan belanja pegawai di bawah 30% (amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah). Akan tetapi untuk alokasi belanja modal terlihat belum patuh, karena masih dibawah 40%. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, bagi pemerintah daerah yang belum memenuhi persentase belanja modal tersebut, diberi waktu untuk penyesuaian sampai 5 tahun kedepan. Masih rendahnya alokasi belanja modal, mengindikasikan pemerintah daerah belum optimal memberikan perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor-sektor di luar tambang.

Gambar 5.
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2018-2021
(dalam %)

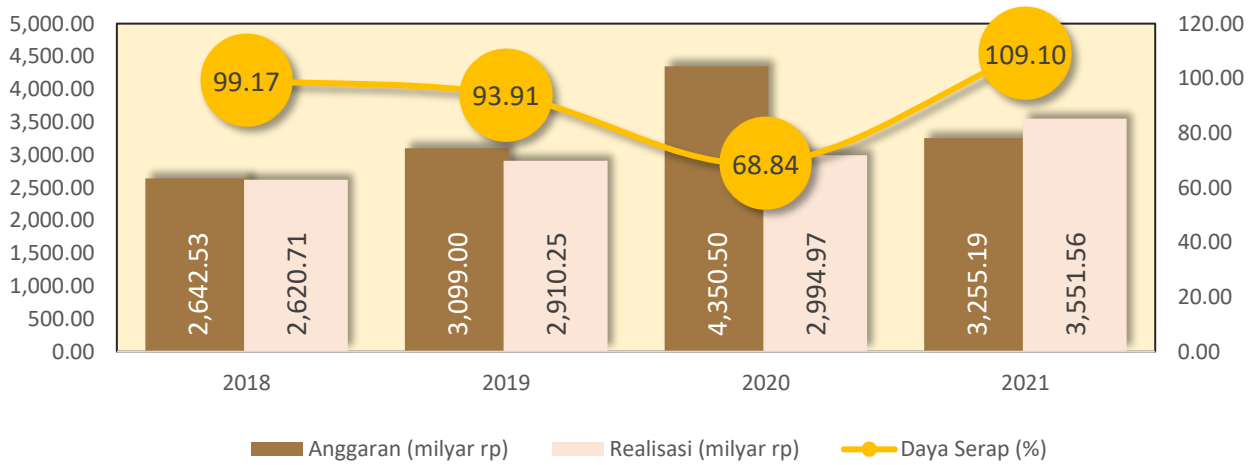


Sumber : SIKD, 2022 (data diolah)

(b) Daya Serap Belanja Daerah

Daya serap belanja selama tahun 2018-2020 cenderung menurun. Penurunan yang curam terjadi di tahun 2020, akibat adanya pandemic Covid-19 menyebabkan seluruh daerah harus melakukan refocusing anggaran belanjanya, kondisi ini mengakibatkan realisasi belanja daerah Mimika hanya mencapai 68,84% dari yang ditargetkan. Namun di tahun 2021, pemerintah kabupaten mampu mengoreksinya, sehingga daya serap belanja naik sangat signifikan menjadi 109,10%.

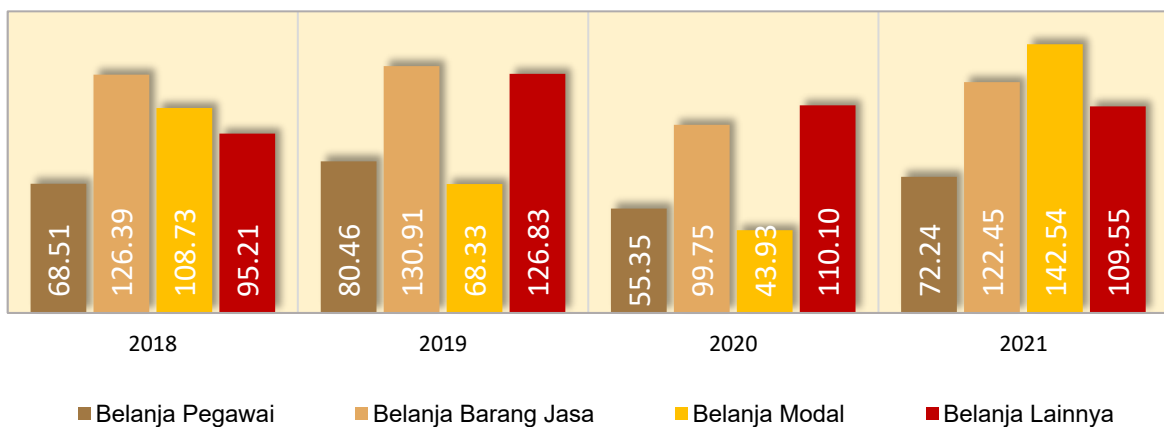
Gambar 6.
Daya Serap Belanja Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021
(dalam %)



Sumber : SIKD, 2022 (data diolah)

Bila melihat menurut jenisnya, belanja daerah Kabupaten Mimika terbagi atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya. Dimana pada tahun 2018, belanja barang dan jasa yang paling tinggi daya serapnya sebesar 126,39% dan yang paling rendah adalah belanja pegawai sebesar 68,51%. Namun pada tahun 2021 mengalami perubahan, dimana Belanja Modal yang paling tinggi daya serapnya mencapai 142,54% dan belanja Pegawai sebesar 72,24%. Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2018-2019, belanja barang dan jasa merupakan yang terbaik daya serapnya, rata-rata 119,87% per tahun Sementara yang terendah selama itu adalah belanja pegawai (69,14% per tahun). Untuk belanja modal cenderung menurun terus selama tahun 2018-2020, namun masih lebih baik dibandingkan belanja pegawai, dimana pada tahun 2021 naik drastis menjadi 142,54%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.

Gambar 7.
Daya Serap Belanja Menurut Jenisnya Kabupaten Mimika
Tahun 2018-2021
(dalam %)



Sumber : SIKD, 2022 (data diolah)

(c) Alokasi Belanja Daerah

Alokasi belanja Pegawai pada tahun 2018 untuk Belanja Gaji dan Tunjangan mendapatkan porsi yang paling tinggi sebesar 50,92% dan yang paling rendah adalah belanja uang lembur sebesar

0,13%. Namun pada tahun 2021 porsi belanja yang paling tinggi pada Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar 47,65%.

Tabel 5.
Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2018-2021
(dalam %)

Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	45,15	47,14	56,20	47,65	49,03
Belanja Gaji dan Tunjangan	50,92	49,27	40,82	40,38	45,35
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH	1,63	1,45	1,25	6,62	2,74
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,48	-	-	5,35	1,46
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,35	1,57	1,33	-	0,81
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,34	0,12	0,11	-	0,39
Belanja Uang Lembur	0,13	0,45	0,29	-	0,22
Total	100	100	100	100	100

Sumber : LHP BPK RI, 2022 (data diolah)

Dalam struktur Belanja Pegawai, tambahan penghasilan PNS dan gaji/tunjangan mendapatkan porsi yang terbesar, keduanya rata-rata memperoleh 49,03% dan 45,35% per tahun dari total belanja selama periode 2018-2021. Sementara yang lainnya rata-rata mendapatkan porsi dibawah 3% per tahun.

Tabel 6.
Alokasi Belanja Barang & Jasa Tahun 2018-2021 (%)

Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
BARANG DAN JASA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	20,85	23,92	18,33	16,25	19,84
Belanja Jasa Kantor	6,72	7,45	5,07	34,64	13,47
Belanja Honorarium Non PNS	14,26	12,17	21,60	0,00	12,01
Belanja Bahan Pakai Habis	6,08	6,34	6,48	28,58	11,87
Belanja Makanan dan Minuman	11,23	11,72	11,43	0,00	8,60
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Pihak Ketiga	7,19	10,29	7,70	0,00	6,30
Belanja Pemeliharaan	2,66	3,53	2,32	5,85	3,59
Belanja Barang Dana BOS	3,56	2,10	4,62	3,14	3,36
Belanja Honorarium PNS	4,71	4,14	4,46	0,00	3,33
Belanja Bahan Material	4,55	4,01	4,19	0,00	3,19
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,31	2,33	3,04	0,00	2,17
Belanja Jasa Konsultansi	2,70	3,76	1,01	0,00	1,87
Belanja Cetak dan Penggandaan	2,59	2,14	1,77	0,00	1,63
Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3,45	1,35	1,44	0,00	1,56
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Masyarakat	1,28	0,73	1,61	2,29	1,48
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	3,95	0,99

Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,40	0,81	0,84	0,00	0,76
Belanja Tenaga Ahli, Instruktur, Narasumber	0,91	0,89	1,24	0,00	0,76
Belanja Premi Asuransi	0,48	0,48	0,44	1,56	0,74
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	2,44	0,61
Belanja Sewa Rumah, Gedung, Gudang, Parkir	0,59	0,51	0,59	0,38	0,52
Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,60	0,54	0,57	0,07	0,45
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,34	0,34	0,39	0,54	0,40
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,15	0,10	0,48	0,00	0,18
Belanja Pakaian Kerja	0,16	0,19	0,16	0,00	0,13
Lainnya	0,23	0,16	0,22	0,31	0,23

Sumber : LHP BPK RI, 2022 (data diolah)

Alokasi perjalanan dinas merupakan yang terbesar pada struktur belanja barang dan jasa, rata-rata mencapai 19,84% per tahun sepanjang periode 2019-2021. Menyusul kemudian untuk jasa kantor 13,47%, honorarium PNS/Non PNS 12% dan bahan habis pakai 11,87%. Untuk lainnya rata-rata dibawah 10% per tahun.

Tabel 7.
Alokasi Belanja Modal Tahun 2018-2021
(dalam %)

Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
BELANJA MODAL	100	100	100	100	100
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	48,37	53,10	32,98	53,12	46,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39,14	25,97	33,84	36,42	33,84
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,63	14,42	15,25	7,49	11,70
Belanja Modal Tanah	1,33	5,50	11,45	2,72	5,25
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,53	1,01	6,48	0,24	2,32

Sumber : LHP BPK RI, 2022 (data diolah)

Untuk komposisi belanja modal, porsi terbesar pada modal jalan, irigasi dan jaringan mencapai 46,89% per tahun selama periode 2018-2021. Kemudian untuk modal gedung dan bangunan 33,84%, serta modal peralatan dan mesin 11,70% per tahun.

Tabel 8.
Alokasi Belanja Lainnya Tahun 2018-2021
(dalam %)

Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Belanja Lainnya	100	100	100	100	100
Transfer / Bantuan Keuangan	50,00	60,09	45,76	69,99	56,46
Hibah	36,17	31,26	20,36	21,66	27,36
Belanja tak terduga	2,03	2,08	33,44	0,07	9,41
Bantuan sosial	7,89	6,56	0,16	8,29	5,72
Bunga	3,11	0,00	0,28	0,00	0,85

Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Subsidi	0,81	0,00	0,00	0,00	0,20

Sumber : LHP BPK RI, 2022 (data diolah)

Rata-rata Alokasi Belanja lainnya sepanjang tahun 2018-2021 untuk belanja Transfer / Bantuan Keuangan mendapat porsi paling tinggi sebesar 56,46% per tahun dan Dana Hibah sebesar 27,36% per tahun. Untuk lainnya rata-rata dibawah 10% per tahun.

3. Penetapan APBD

Jika mengacu pada data DJPK-RI dan BPKAD Provinsi Papua, selama tahun 2014-2022, penetapan APBD-Induk Kabupaten Mimika cenderung tidak pernah tepat waktu. Bahkan untuk beberapa waktu, yaitu tahun 2014, 2106, 2017, 2018, semua terlambat lebih dari 2 bulan (60 hari). Mulai ada koreksi di tahun 2019 dan 2018, semuanya tepat waktu, bahkan lebih cepat beberapa hari. Namun di tahun 2021 dan 2022 kembali lagi mengalami kelambatan penetapan APBD, rata-rata di atas 1 bulan. Selengkapnya lihat Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9.
Penetapan APBD Kabupaten Mimika
Tahun 2014-2022

Tahun	Penetapan APBD-Induk	Batas Waktu Penetapan	Kelebihan Waktu (hari)	Kategori
2014	04/04/2014	30/12/2013	95	Tidak Tepat Waktu
2015	30/12/2014	30/12/2014	0	Tepat Waktu
2016	04/04/2016	30/12/2015	96	Tidak Tepat Waktu
2017	17/03/2017	30/12/2016	77	Tidak Tepat Waktu
2018	09/04/2018	30/12/2017	100	Tidak Tepat Waktu
2019	28/12/2018	30/12/2018	-2	Tepat Waktu
2020	27/12/2019	30/12/2019	-3	Tepat Waktu
2021	06/02/2021	30/12/2020	38	Tidak Tepat Waktu
2022	04/02/2022	30/12/2021	36	Tidak Tepat Waktu

Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan BPKAD Provinsi Papua (data diolah)

Perlu diperhatikan, Jika APBD terlambat disahkan maka aliran dana dari sektor pemerintahan akan terhambat dan berpengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah. Dengan hal seperti ini perekonomian daerah akan turut merasakan dampaknya dengan adanya kelesuan ekonomi. Karenanya sangat penting sekali untuk mengoptimalkan proses penyusunan APBD, mulai dari RENJA, RKPD dan Musrenbang, KUA-PPAS, RAPBD, agar semuanya tepat waktu.

4. Capaian Kinerja Belanja Program

Pada tahun 2018 secara rata-rata tercatat bahwa capaian kinerja belanja program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebesar 94,61%, namun pada tahun 2019 rata-rata capaian kinerja belanja program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya mampu mencapai 88,03% atau mengalami pertumbuhan secara negatif sebesar -6,58%.

Berdasarkan capaian kinerja belanja program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dapat terlihat bahwa capaian kinerja belanja program tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan sebesar 99,32%, serta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 99,08%. Kemudian pada tahun 2019, capaian kinerja belanja program tertinggi dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar 100%, serta Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar 98,79%.

Tabel 10.
Capaian Kinerja Belanja Program Tahun 2018-2019
(dalam %)

Organisasi Perangkat Daerah	2018	2019	Perubahan
Dinas Pendidikan	93,99	93,77	-0,23
Dinas Kesehatan	89,03	93,73	4,70
Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	97,25	97,58	0,33
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	96,64	67,84	-28,80
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	95,75	37,28	-58,47
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81,86	79,49	-2,37
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	99,08	91,58	-7,50
Dinas Sosial	98,44	98,41	-0,03
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	94,86	100,30	5,45
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	98,11	94,94	-3,18
Dinas Ketahanan Pangan	99,32	98,37	-0,95
Dinas Lingkungan Hidup	98,65	96,99	-1,66
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	97,34	97,90	0,56
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	72,10	76,98	4,88
Dinas Perhubungan	93,10	58,22	-34,87
Dinas Komunikasi Dan Informatika	95,53	95,54	0,01
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	97,54	95,63	-1,91
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95,67	91,41	-4,26
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	98,37	42,55	-55,82
Dinas Perpustakaan Dan Arsip	96,57	96,41	-0,15
Dinas Kelautan Dan Perikanan	98,78	96,37	-2,41
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	97,95	98,79	0,84
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	94,87	96,77	1,90
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	97,38	97,20	-0,18
Sekretariat Daerah	94,62	88,42	-6,19
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	92,70	97,16	4,46
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,07	79,90	-10,16
Badan Pendapatan Daerah	96,01	85,23	-10,79
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	95,09	84,60	-10,49
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	86,81	85,85	-0,96
Badan Inspektorat	96,77	97,63	0,86
Distrik	94,19	97,80	3,61
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	97,68	94,48	-3,20

Sumber: LKPJ 2018-2019 (Diolah)

Keterangan : Perubahan kinerja hanya dihitung untuk program yang sama dilaksanakan berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019

Jika melihat tingkat perubahan terhadap capaian kinerja belanja program dari tahun 2018-2019, terlihat bahwa perubahan capaian kinerja tertinggi dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar 5,45%, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebesar 4,88%. Kemudian perubahan capaian kinerja belanja program terendah terjadi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan sebesar -58,47%, serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga sebesar 55,82%.

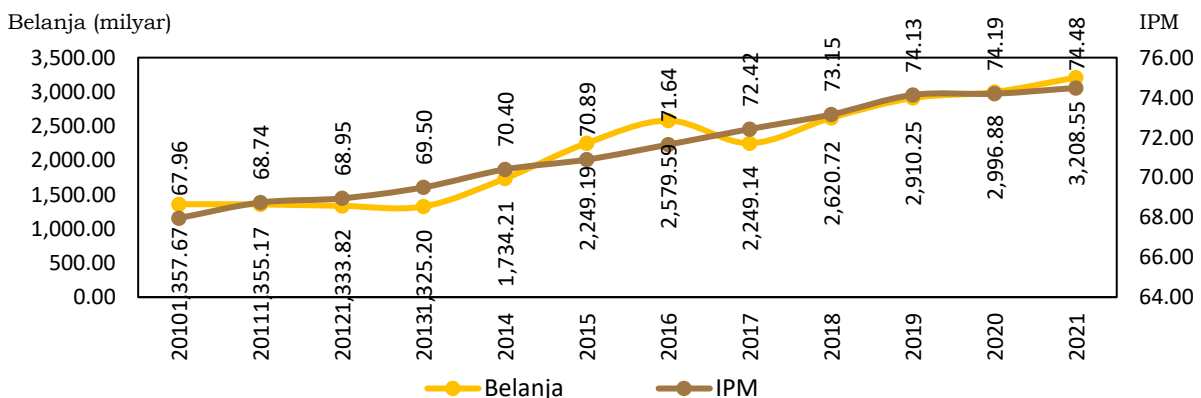
5. Efektifitas Belanja Daerah Terhadap Kinerja Makro

Untuk melihat efektifitas dari belanja daerah terhadap beberapa indikator makro sosial ekonomi (IPM, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan PDRB) digunakan 2 model elastisitas yaitu : (1) model elastisitas continuous, dengan menggunakan model regresi double log; dan (2) model elastisitas discreet, dengan mengukur rasio perbandingan antara pertumbuhan belanja dengan pertumbuhan indikator makro yang digunakan dalam pengukuran elastisitas ini.

Pada model elastisitas continuous, hubungan dinamis antara variabel belanja daerah dengan masing-masing indikator makro menggunakan kurve trend, serta analisis elastisitasnya dapat disampaikan sebagai berikut.

Pertama, hubungan dinamis antara belanja daerah dengan IPM. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Mimika, secara umum terlihat meningkat, Namun jika diperhatikan pergerakannya fluktuatif. Belanja tahun 2010-2013 terlihat mengalami penurunan dari Rp 1,357,67 miliar menjadi Rp 1.325,20 miliar atau turun sebesar 34,47 miliar, selanjutnya meningkat konsisten tahun 2014-2016 dari Rp 1.724,21 miliar menjadi Rp 2.579,59 miliar atau naik Rp 845,37 miliar. Tahun 2016-2017 terlihat menurun, namun kemudian meningkat kembali di tahun 2017-2021 atau menjadi Rp 3.208,55 miliar. Sedangkan untuk IPM terlihat konsisten mengalami peningkatan tahun 2010-2021 dari angka 67,96 menjadi 74,48 atau naik 6,52 poin.

Gambar 8.
Hubungan Dinamis Antara Belanja Daerah Dengan IPM
Di Kabupaten Mimika Tahun 2010-2021



Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan BPS Papua, 2022 (data diolah)

Dari hasil analisis model elastisitas continuous (perhatikan Tabel 11), terlihat bahwa terdapat Pengaruh sangat signifikan Belanja Daerah terhadap IPM Kabupaten Mimika, yang mana setiap penambahan Belanja daerah Mimika sebesar 1 persen berdampak pada kenaikan IPM sebesar 0,089 persen (nilai elastisitas). Pemanfaatan belanja pada program-program kesehatan, ekonomi dan pendidikan perlu ditingkatkan efektifitasnya agar dapat lebih memberi dampak lebih besar terhadap peningkatan IPM kabupaten Mimika.

Tabel 11.
Hasil Analisis Model Elastisitas Continuous Belanja Daerah Terhadap IPM
Di Kabupaten Mimika

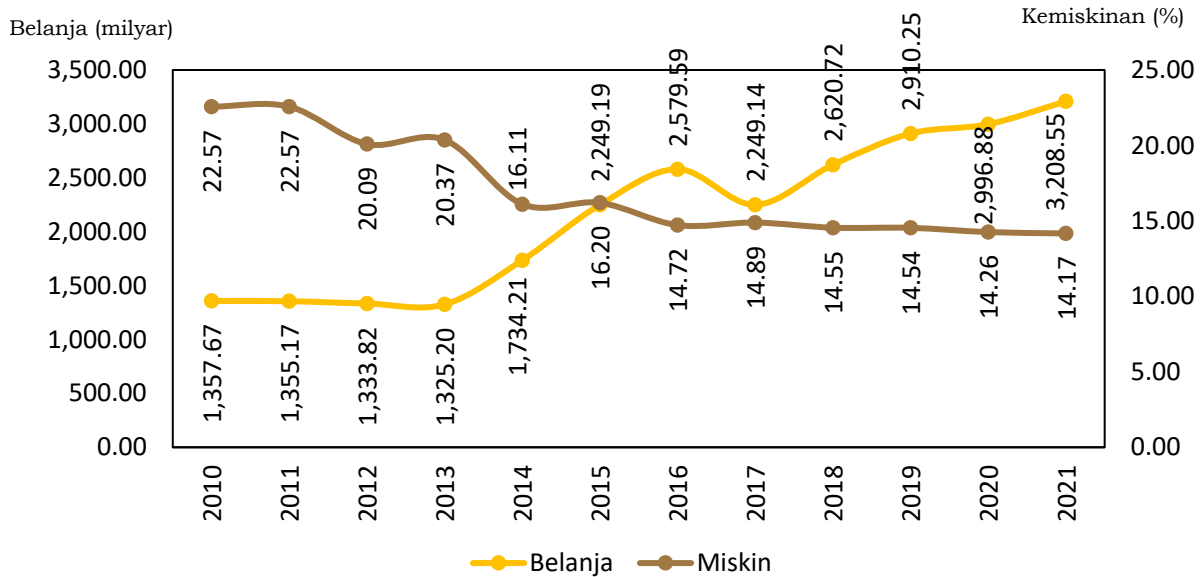
Variabel	Coef.	SE	t Stat	P-value	Keputusan
Intercept	3,5905	0,0641	56,0540	0,0000	
Belanja → IPM	0,0888	0,0084	10,5785	0,0000	Sangat Signifikan

Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan BPS Papua, 2022 (data diolah)

Kedua, hubungan dinamis antara belanja daerah dengan Tingkat Kemiskinan. Cenderung ketika terjadi kenaikan belanja selama periode 2010-2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika

terus mengalami penurunan. Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 9 perkembangan kemiskinan di Kabupaten Mimika menunjukkan penurunan terutama Sejak tahun 2017. Sebelumnya untuk tahun 2010-2017 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika mengalami fluktuatif yang menurun. Terlihat bahwa sempat terjadi peningkatan kemiskinan di tahun 2011, 2013, 2015 dan tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 9.
Hubungan Dinamis Antara Belanja Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Mimika Tahun 2010-2021



Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan BPS Papua, 2022 (data diolah)

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis model elastisitas continuous (perhatikan Tabel 12), terlihat bahwa belanja daerah berdampak sangat signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Mimika yang mana dengan tambahan belanja daerah sebesar 1 persen dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,497 persen. Walaupun demikian, pemanfaatan Belanja daerah terkait program-program kemiskinan perlu lebih efektif dan tepat sasaran sehingga dapat lebih besar memberi dampak terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Mimika.

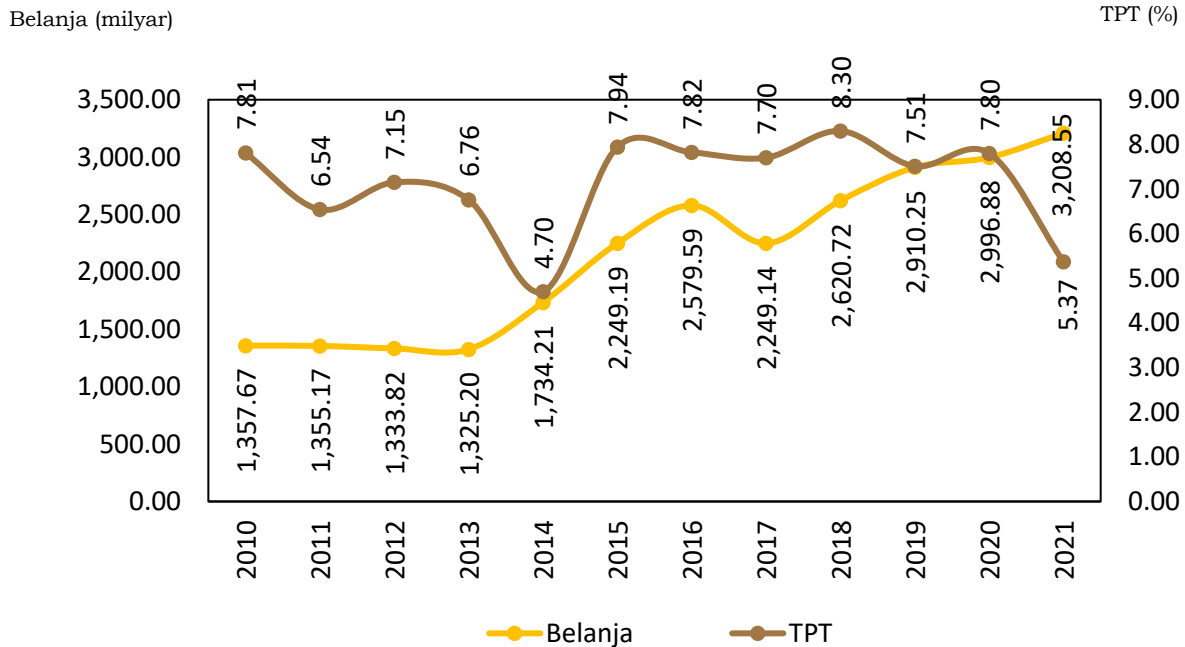
Tabel 12.
Hasil Analisis Model Elastisitas Continuous Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Mimika

Variabel	Coef.	SE	t Stat	P-value	Keputusan
Intercept	6,6118	0,4386	15,0758	0,0000	
Belanja→Miskin	-0,4971	0,0575	-8,6494	0,0000	Sangat Signifikan

Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan BPS Papua, 2022 (data diolah)

Ketiga, hubungan dinamis antara belanja daerah dengan Tingkat Pengangguran. Berbeda dengan Tingkat Kemiskinan, hubungan antara belanja daerah dengan Tingkat Pengangguran dapat dikatakan sangat lemah. Hal ini disebabkan ketika belanja daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun tingkat pengangguran cenderung berubahannya random (naik dan turun drastis). Seperti yang terlihat pada Gambar 10, perkembangan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Kabupaten Mimika terlihat sangat fluktuatif sepanjang tahun 2010-2021. Terjadi peningkatan TPT di tahun 2012, tahun 2015, tahun 2018 dan tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. TPT terendah dicapai Kabupaten Mimika tahun 2014 sebesar 4,70 persen, kemudian melonjak tinggi ditahun 2018 menjadi 8,30 persen. Perkembangan Belanja daerah meningkat terutama di tahun 2013-2016, tetapi tidak diikuti dengan Penurunan TPT, yang nampak cenderung meningkat yaitu dari 6,76 persen menjadi 7,94 persen.

Gambar 10.
**Hubungan Dinamis Antara Belanja Daerah Dengan Tingkat Pengangguran
Di Kabupaten Mimika Tahun 2010-2021**



Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan BPS Papua, 2022 (data diolah)

Oleh karena hubungan dinamis antara variabel belanja daerah dengan tingkat pengangguran bersifat random, akhirnya dari hasil analisis model elastisitas, terlihat bahwa Belanja daerah tidak memberikan dampak pada TPT Kabupaten Mimika. Oleh karena itu pengalokasian Belanja Daerah Kabupaten Mimika pada program dan kegiatan dengan sararan Penurunan pengangguran perlu lebih ditingkatkan agar lebih efektif.

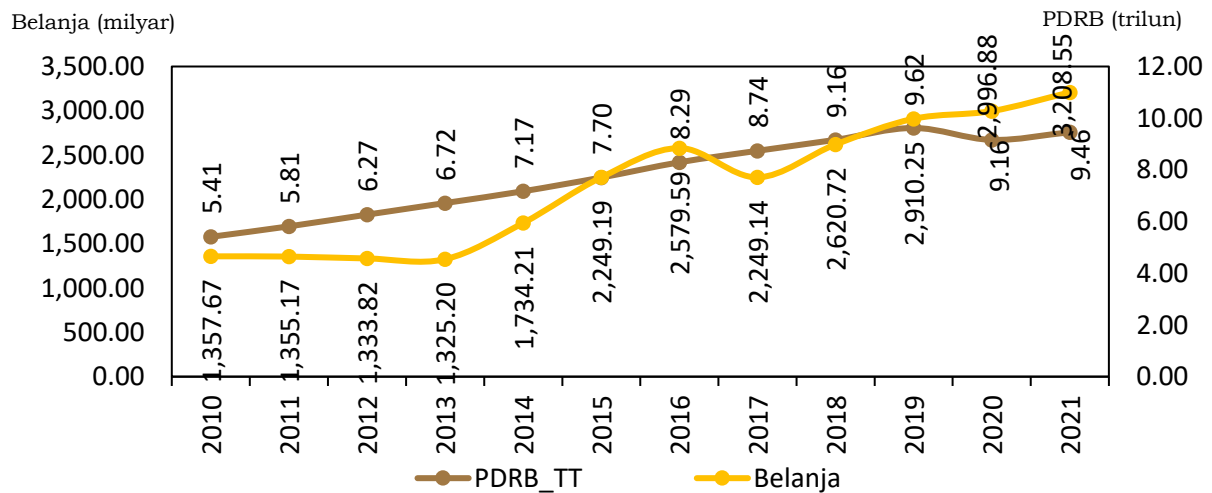
Tabel 13.
**Hasil Analisis Model Elastisitas Continuous Belanja Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran
Di Kabupaten Mimika**

Variabel	Coef.	SE	t Stat	P-value	Keputusan
Intercept	1,4348	1,1854	1,2104	0,2539	
Belanja → TPT	0,0675	0,1553	0,4347	0,6729	Non Signifikan

Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan BPS Papua, 2022 (data diolah)

Keempat, hubungan dinamis antara belanja daerah dengan Pertumbuhan PDRB Tanpa Tambang (PDRB-TT). Hubungan antara belanja daerah dengan pertumbuhan PDRB-TT Kabupaten Mimika dapat dikatakan sesuai teori, yaitu memiliki hubungan yang positif. Dimana ketika belanja daerah naik, PDRB-TT juga ikut meningkat. Seperti yang disajikan pada Gambar 11, perkembangan PDRB-TT Kabupaten Mimika mengalami peningkatan sepanjang tahun 2010-2019 dari Rp. 5,41 triliun menjadi Rp 9,62 triliun. Meskipun di tahun 2020 sempat menurun menjadi Rp 9,16 triliun sebagai dampak pembatasan aktivitas masyarakat di masa Pandemi Covid-19, namun begitu masuk di tahun 2021 ketika mulai ada pelonggaran kegiatan masyarakat menyebabkan PDRB-TT Kabupaten Mimika naik kembali menjadi Rp 9,46 triliun.

Gambar 11.
Hubungan Dinamis Antara Belanja Daerah Dengan PDRB Tanpa Tambang Di Kabupaten Mimika Tahun 2010-2021



Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan BPS Papua, 2022 (data diolah)

Berikutnya, dari hasil analisis model elastisitas continuous (lihat Tabel 14), tampak jelas belanja daerah memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap PDRB Kabupaten Mimika, yang mana peningkatan Belanja daerah sebesar 1 persen berdampak pada peningkatan PDRB Kabupaten Mimika sebesar 0,54 persen.

Tabel 14.
Hasil Analisis Model Elastisitas Continuous Belanja Daerah Terhadap PDRB Tanpa Tambang Di Kabupaten Mimika

Variabel	Coef.	SE	t Stat	P-value	Keputusan
Intercept	-2,1065	0,4507	-4,6738	0,0009	
Belanja → PDRB	0,5433	0,0591	9,1986	0,0000	Sangat Signifikan

Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan BPS Papua, 2022 (data diolah)

Dari berbagai hasil pengukuran di atas, dapat disampaikan rekapitulasi model elastisitas belanja daerah untuk Kabupaten Mimika sebagai berikut :

Tabel 15.
Hasil Analisis Model Elastisitas Continuous Belanja Daerah Terhadap Indikator Makro Sosial Ekonomi Di Kabupaten Mimika

Dependent Variabel	Elastisitas	Signifikansi (p-value < 0,05)		Efektifitas
IPM	0,0888	0,0000	Sangat Signifikan	Sangat Rendah
Tingkat Kemiskinan	-0,4971	0,0000	Sangat Signifikan	Rendah
Tingkat Pengangguran	0,0675	0,4347	Non Signifikan	Tidak Efektif
PDRB_TT	0,5433	0,0000	Sangat Signifikan	Rendah

Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan BPS Papua, 2022 (data diolah)

Beranjak pada hasil pengembangan model elastisitas continuous di atas, maka dapat disampaikan beberapa indikasi terkait dengan efektifitas belanja daerah di Kabupaten Mimika sebagai berikut :

- Efektifitas Pengelolaan Belanja daerah terhadap peningkatan IPM terindikasi masih sangat Rendah, hal ini terlihat dari angka elastisitas yang kecil yaitu 0,0888.
- efektifitas pengelolaan Belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan terindikasi Rendah dengan nilai elastisitas -0,4971.
- Efektifitas belanja daerah terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika terindikasi tidak efektif dengan nilai elastisitas 0,0675.
- Efektifitas belanja daerah terhadap PDRB-TT di Kabupaten Mimika terindikasi rendah dengan nilai elastisitas 0,5433.

Secara keseluruhan dari hasil pengolahan data selama tahun 2010-2021 menunjukkan pengelolaan belanja daerah belum begitu efektif untuk menurunkan pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan PDRB dan IPM. Kondisi ini tergambarkan pada angka elastisitas belanja daerah yang masih dibawah absolut 1, sehingga efektifitas belanja terindikasi dinilai rendah terhadap indikator-indikator makro daerah.

Adapun untuk pengukuran model elastisitas diskrit, yang diperoleh dengan cara membandingkan antara pertumbuhan belanja daerah dengan masing-masing indikator makro yang diukur, didapatkan perhitungan elastisitas belanja daerah per tahun sebagai berikut.

Tabel 16.
Model Elastisitas Diskrit Belanja Daerah Terhadap Indikator Makro Sosial Ekonomi
Di Kabupaten Mimika Tahun 2011-2021

Tahun	Bd → IPM	Bd → Miskin	Bd → TPT	Bd → PDRB-TT
2011	-6,2317	0,0000	6,8956	-40,6698
2012	-0,1939	1,5741	-0,3872	-4,9519
2013	-1,2352	-0,4336	0,6039	-11,0765
2014	0,0420	-0,1380	-0,0667	0,2203
2015	0,0234	0,0030	0,1091	0,2492
2016	0,0720	-0,1008	-0,0082	0,5205
2017	-0,0850	-0,0133	0,0094	-0,4190
2018	0,0610	-0,0206	0,0363	0,2942
2019	0,1213	-0,0009	-0,0715	0,4529
2020	0,0272	-0,0941	0,0974	-1,6109
2021	0,0553	-0,0127	-0,3440	0,4601
Rata²	0,1028	-0,5095	-0,4117	0,6407

Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan BPS Papua, 2022 (data diolah)

Keterangan : Rata-rata elastisitas diperoleh berdasarkan rasio pertumbuhan eksponensial

Perkembangan elastisitas belanja daerah terhadap IPM di Kabupaten Mimika sepanjang tahun 2011-2021 cenderung fluktuatif. Elastisitas belanja daerah tahun 2011-2013 dan tahun 2017 terlihat negative, artinya bahwa peningkatan 1 persen belanja daerah berdampak negative atau sangat tidak responsive terhadap peningkatan IPM. Secara rata-rata dapat dilihat bahwa Pengaruh belanja daerah responnya kecil terhadap IPM yang mana peningkatan 1 persen belanja daerah hanya berdampak pada peningkatan IPM sebesar 0,10 persen.

Perkembangan elastisitas belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika sepanjang tahun 2011-2021 juga terlihat fluktuatif, tahun 2011, 2012 dan 2015 bahkan menunjukkan nilai positif artinya peningkatan 1 persen belanja tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan bahkan di tahun 2013 meningkatkan tingkat kemiskinan 1,57 persen. Secara rata-rata dapat dikatakan bahwa peningkatan belanja daerah Kabupaten Mimika 1 persen berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,51 persen.

Perkembangan angka elastistas belanja daerah terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderung fluktuatif sepanjang tahun 2011-2021 bahkan dominan angka elastisitas bernilai positif. Di tahun 2011 angka elastisitas yang positif menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen belanja daerah tidak berdampak pada penurunan TPT tetapi peningkatan TPT sebesar 6,90 persen (elastis). Namun secara rata-rata, dapat dikatakan bahwa peningkatan belanja daerah Kabupaten Mimika sebesar 1 persen berdampak pada penurunan TPT sebesar 0,41 persen (in elastis) walaupun demikian belanja daerah terlihat tidak responsive terhadap penurunan TPT di Kabupaten Mimika.

Demikian juga dengan angka elastisitas yang diperoleh dengan melihat pengaruh belanja daerah terhadap PDRB Kabupaten Mimika menunjukkan perkembangan angka yang fluktuatif sepanjang tahun 2011-2021. Respon negative terbesar terlihat pada tahun 2011 yang mana angka elastisitas sebesar -40,67 (in elastis). Demikian juga di tahun 2012,2013,2017 dan 2020. Secara rata-rata dapat dikatakan bahwa Pengaruh belanja daerah terhadap PDRB-TT di Kabupaten Mimika bernilai positif, artinya peningkatan/kenaikan 1 persen belanja daerah di Kabupaten Mimika dapat berdampak pada kenaikan PDRB-TT sebesar 0,64 persen atau in elastis.

6. Penilaian Kualitas APBD Kabupaten Mimika

Berdasarkan indikator-indikator kinerja APBD yang di sajikan di atas, dan model penilaian kualitas APBD yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disampaikan analisis kualitas APBD Kabupaten Mimika selama periode 2018 - 2021 sebagai berikut.

Tabel 17.
Penilaian Kualitas APBD Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021

Indikator	2018		2019		2020		2021	
	Nilai Kinerja	Skor	Nilai Kinerja	Skor	Nilai Kinerja	Skor	Nilai Kinerja	Skor
1. Ketepatan waktu penetapan APBD-Induk	Tidak Tepat Waktu	1	Tepat Waktu	3	Tepat Waktu	3	Tidak Tepat Waktu	1
2. Opini BPK atas LKPD	WTP	3	WTP	3	WTP	3	WTP	3
3. Kinerja Pendapatan Daerah		2		2		2		2
a. Efektifitas Pendapatan Daerah	124,33 %	1,5	101,62 %	1,5	86,73%	1,5	103,70 %	1,5
b. Kemandirian Fiskal	12,18%	0,5	13,53%	0,5	17,09%	0,5	23,29%	0,5
4. Proporsi Belanja Daerah		2		2		2		3
a. Belanja pegawai	21,58%	1,5	20,87%	1,5	24,53%	1,5	21,69%	1,5
b. Belanja modal	28,21%	0,5	28,19%	0,5	21,51%	0,5	32,50%	1,5
5. Mandatory Spending		2,5		2		2,5		2
a. Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan	10,10%	1	9,47%	0,5	13,43%	1	9,90%	0,5

Indikator	2018		2019		2020		2021	
	Nilai Kinerja	Skor	Nilai Kinerja	Skor	Nilai Kinerja	Skor	Nilai Kinerja	Skor
b. Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan	14,22%	1,5	12,53%	1,5	13,62%	1,5	15,17%	1,5
6. Daya Serap Belanja	99,17%	3	93,91%	3	68,84%	2	109,10 %	3
7. Efektifitas Belanja *		1		1		1		1
a. Pertumbuhan Ekonomi	0,2942	0,5	0,4529	0,5	-1,6109	0,5	0,4601	0,5
b. Kemiskinan	-0,0206	0,5	-0,0001	0,5	-0,0941	0,5	-0,0130	0,5
8. Rata-rata capaian kinerja belanja program	94,29%	3	90,33%	3	92,39%	3	92,39%	3
Total Skor Aktual		17,50		19,00		18,50		18,00
Total Skor Harapan		24,00		24,00		24,00		24,00
Nilai Kualitas APBD		72,92		79,17		77,08		75,00

Sumber : data diolah (2022)

Keterangan : * Efektifitas belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menggunakan nilai elastisitas diskrit

Dari hasil penilaian kualitas APBD Kabupaten Mimika sepanjang tahun 2018-2021, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa capaian skor tertinggi secara konsisten teridentifikasi pada opini BPK atas LKPD dan rata-rata capaian belanja program.

Untuk tahun 2018, skor tertinggi diperoleh dari opini BPK atas LKPD, daya serap belanja dan rata-rata capaian belanja program, Sedangkan skor penilaian terendah teridentifikasi dari kemandirian fiskal, belanja modal, elastisitas terhadap pertumbuhan, dan elastisitas terhadap kemiskinan. Tahun 2019, skor tertinggi diperoleh dari ketepatan waktu penetapan APBD Induk, opini BPK atas LKPD, daya serap belanja, dan rata-rata capaian belanja program, sedangkan skor terendah teridentifikasi dari kemandirian fiskal, belanja modal, Alokasi belanja fungsi pendidikan, elastisitas terhadap pertumbuhan, dan elastisitas terhadap kemiskinan.

Tahun 2020, skor tertinggi diperoleh dari ketepatan waktu penetapan APBD Induk, opini BPK atas LKPD, dan rata-rata capaian belanja program, sedangkan skor terendah teridentifikasi dari kemandirian fiskal, belanja modal, alokasi belanja fungsi pendidikan, elastisitas terhadap pertumbuhan, dan elastisitas terhadap kemiskinan. Tahun 2021, skor tertinggi diperoleh dari opini BPK atas LKPD, daya serap belanja, dan rata-rata capaian belanja program, sedangkan skor terendah teridentifikasi dari kemandirian fiskal, Alokasi belanja fungsi pendidikan, elastisitas terhadap pertumbuhan, dan elastisitas terhadap kemiskinan.

Dari hasil rekapitulasi penilaian Kualitas APBD tahun 2018-2021, menunjukkan hasil bervariasi, lihat Tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18.
Kualitas APBD Kabupaten Mimika Tahun 2018-2021

Tahun	Indikator	Nilai dan Deskripsi
2018	Nilai Kualitas APBD	72,92
	Kriteria Kualitas APBD	Kurang Berkualitas
	Permasalahan menurut kriteria penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan APBD tidak tepat waktu 2. Tingkat kemandirian fiskal sangat rendah 3. Alokasi belanja modal kurang 4. Alokasi belanja pendidikan belum memenuhi mandatory spending 5. Belanja daerah kurang efektif mempercepat pertumbuhan ekonomi 6. Belanja daerah kurang efektif mempercepat penurunan kemiskinan
2019	Nilai Kualitas APBD	79,17
	Kriteria Kualitas APBD	Cukup Berkualitas
	Permasalahan menurut kriteria penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemandirian fiskal sangat rendah 2. Alokasi belanja modal kurang 3. Alokasi belanja pendidikan belum memenuhi mandatory spending 4. Belanja daerah kurang efektif mempercepat pertumbuhan ekonomi 5. Belanja daerah kurang efektif mempercepat penurunan kemiskinan
2020	Nilai Kualitas APBD	77,08
	Kriteria Kualitas APBD	Cukup Berkualitas
	Permasalahan menurut kriteria penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemandirian fiskal sangat rendah 2. Alokasi belanja modal kurang 3. Alokasi belanja pendidikan belum memenuhi mandatory spending 4. Belanja daerah kurang efektif mempercepat pertumbuhan ekonomi 5. Belanja daerah kurang efektif mempercepat penurunan kemiskinan 6. Daya serap belanja kurang
2021	Nilai Kualitas APBD	75,00
	Kriteria Kualitas APBD	Kurang Berkualitas
	Permasalahan menurut kriteria penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan APBD tidak tepat waktu 2. Tingkat kemandirian fiskal sangat rendah 3. Alokasi belanja pendidikan belum memenuhi mandatory spending 4. Belanja daerah kurang efektif mempercepat pertumbuhan ekonomi

Tahun	Indikator	Nilai dan Deskripsi
		5. Belanja daerah kurang efektif mempercepat penurunan kemiskinan

Sumber : data diolah (2022)

Tahun 2018, kualitas APBD Kabupaten Mimika mendapatkan total skor 17,50 poin dari 24 poin yang diharapkan, sehingga secara keseluruhan nilai kualitas APBD hanya mencapai 72,92 poin yang masuk dalam kategori Kurang Berkualitas. Untuk tahun 2019, terjadi peningkatan skor total menjadi 19,00, sehingga penilaian kualitas APBD Kabupaten Mimika mencapai 79,17 poin yang masuk kategori Cukup Berkualitas. Demikian juga untuk tahun 2020 walaupun skor totalnya menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai 18,50 poin, namun penilaian kualitas masih masuk kategori Cukup Berkualitas, dengan nilai kualitas APBD sebesar 77,08. Untuk capaian penilaian tahun 2021, terjadi penurunan dibanding tahun 2020, yang mana angka skor total turun 0,50 poin sehingga skor total menjadi 18,00, dengan nilai kualitas APBD sebesar 75,00 yang menyebabkan kategori kualitasnya turun kembali menjadi Kurang Berkualitas. Disini penyebab turunnya skor total, terutama disebabkan karena terlambat dalam penetapan APBD induk tahun 2021 dan *mandatory spending* fungsi belanja pendidikan yang tidak sesuai perundang-undangan atau hanya 9,90 persen.

Berdasarkan hasil penilaian kualitas APBD di atas, ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan secara rata-rata kualitas APBD di Kabupaten Mimika selama tahun 2018 - 2021 terindikasi masih belum berkualitas, antara lain :

- a. APBD tidak tepat waktu, disebabkan :
 - Belum maksimalnya koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif;
 - Pelaksanaan pendekatan parsitipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang yang belum maksimal;
 - Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam penyusunan APBD;
 - Kapasitas OPD yang belum maksimal dalam menterjemahkan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang merupakan komponen dalam pembentuk APBD.
- b. Rendahnya Kemandirian Fiskal, disebabkan :
 - Belum optimalnya komitmen pimpinan daerah dan satuan kerja BAPENDA dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi PAD;
 - Belum optimalnya penerimaan Pajak dan Retribusi daerah;
 - Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap PAD.
- c. Alokasi belanja pendidikan belum memenuhi *mandatory spending*, disebabkan :
 - Belum optimalnya komitmen TAPD dalam menetapkan alokasi urusan Pendidikan;
 - Belum maksimalnya inovasi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan;
 - Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam merencanakan program/kegiatan pendidikan.
- d. Komponen belanja perjalanan dinas masih mendominasi struktur Belanja Barang dan Jasa, disebabkan :
 - Kondisi geografi dan topografi yang ekstrim menyebabkan biaya perjalanan yang dikeluarkan menjadi besar;
 - Komponen belanja perjalanan dinas pada sebagian besar pelaksanaan program/kegiatan sulit direalokasi karena sangat dibutuhkan. Contohnya dalam kegiatan pelatihan/bimbingan teknis ASN, monitoring dan evaluasi, pengadaan barang, dan sebagainya.
- e. Elastisitas belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sangat rendah, disebabkan :
 - Secara keseluruhan alokasi belanja modal terlihat belum patuh, karena masih dibawah 40%. Sehingga belum optimal memberikan perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan tingkat kemiskinan
 - Belanja daerah lebih dominan membiayai opsional yang akan habis dalam satu tahun anggaran dan kurang memperhatikan alokasi belanja modal dan kegiatan yang mendorong kegiatan produksi rakyat
 - Belum optimalnya sinerjitas dan koordinasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan.

Mengacu pada isu-isu strategis di atas, agar pengelolaan APBD Kabupaten Mimika lebih berkualitas dimasa mendatang, hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi kebijakan sebagai berikut :

- a. Dalam upaya meningkatkan ketepatan waktu dalam penetapan APBD, kebijakan yang perlu dilakukan adalah :
 - Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislative;
 - Memaksimalkan pendekatan parsipatif dalam mekanisme Musrenbang;
 - Mengoptimalkan koordinasi antar OPD dalam penyusunan APBD;
 - Meningkatkan Kapasitas OPD dalam mengidentifikasi dan merumuskan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang merupakan komponen dalam pembentuk APBD.
- b. Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal, kebijakan yang perlu dilakukan adalah:
 - Mengoptimalkan komitmen pimpinan daerah dan satuan kerja BAPENDA dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi PAD;
 - Mengoptimalkan penerimaan Pajak dan Retribusi daerah;
 - Meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan pengawasan terhadap pemungutan Pajak dan Retribusi daerah;
 - Memaksimalkan kontribusi BUMD terhadap PAD;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil-hasil pembangunan yang mendukung peningkatan PAD.
- c. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi *mandatory spending* pada belanja menurut fungsi pendidikan, kebijakan yang perlu dilakukan adalah:
 - Mengoptimalkan komitmen TAPD dalam menetapkan alokasi urusan pendidikan;
 - Meningkatkan tata kelola belanja pada fungsi pendidikan, yang tidak hanya merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi juga termasuk, antara lain Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - Meningkatkan kapasitas OPD dalam melakukan inovasi pengelolaan anggaran pendidikan.
- d. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja perjalanan dinas, kebijakan yang perlu dilakukan adalah:
 - Meningkatkan sarana dan prasarana aksesibilitas yang dapat membebani belanja perjalanan dinas;
 - Meningkatkan efisiensi belanja perjalanan dinas melalui refocusing dan penerapan *money follow program priority* pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas ASN, rapat-rapat koordinasi dan teknis, monitoring dan evaluasi, pengadaan barang, dan sebagainya;
 - Mengoptimalkan penerapan asas efisiensi oleh satuan kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi digital.
- e. Dalam upaya meningkatkan efektifitas APBD terhadap indikator-indikator makro sosial ekonomi, kebijakan yang perlu dilakukan adalah:
 - Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal lebih dari 40%, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan tingkat kemiskinan;
 - Merealokasi dan refocusing pembiayaan operasional pada belanja modal dan kegiatan yang mendorong produksi UMKM;
 - Mengoptimalkan sinerjitas dan koordinasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan;
 - Memaksimalkan peran distrik dan kampung dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, baik secara sektoral maupun spasial.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Struktur APBD Kabupaten Mimika jika dilihat dari aspek pendapatan selama tahun 2018-2021 masih bertumpu pada Dana Transfer dari pemerintah pusat, rata-rata pertahun bisa mencapai 77,65%. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Mimika terkategori dengan kemampuan keuangan yang rendah selama ini, dimana pada tahun 2021 tercatat hanya mencapai 23,29%. PAD yang merupakan pendapatan dari daerah sendiri

tampaknya belum dapat diandalkan untuk menopang struktur APBD Kabupaten Mimika sampai saat ini, karena rata-rata hanya berkontribusi 15,32% per tahun selama tahun 2018-2021 tersebut, dengan sumber pendapatannya tertinggi berasal dari penerimaan Pajak Daerah yang mampu memberi kontribusinya sekitar sebesar 48,07% per tahun.

- b. Dari aspek belanja, selama tahun 2018-2020 struktur belanja daerah Kabupaten Mimika dominan pada Belanja Barang dan Jasa. Kemudian di tahun 2021 terjadi perubahan struktur, dimana Belanja Modal relatif mendominasi yaitu 32,50%. Walaupun cenderung dominan, akan tetapi alokasinya masih di bawah 40%, sehingga kepatuhan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengalokasikan belanja modal sesuai peraturan yang berlaku masih belum optimal. Adapun untuk daya serap belanja, selama tahun 2018-2019, Belanja Barang dan Jasa merupakan yang terbaik daya serapnya, rata-rata 119,87% per tahun, sedangkan yang terendah adalah Belanja Pegawai sebesar 69,14% per tahun.
- c. Efektifitas APBD Kabupaten Mimika, khususnya efektifitas belanja daerah, terhadap perkembangan makro sosial-ekonomi terindikasi masih rendah, terutama terhadap IPM, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Meskipun secara statistik pengaruhnya signifikan terhadap ketiga indikator makro tersebut, akan tetapi efektifitasnya sangat rendah. Fenomena ini masing-masing ditunjukkan dengan kecilnya nilai elastisitas belanja daerah (kurang dari 1) terhadap IPM (0,1028), pertumbuhan ekonomi (0,6407), dan kemiskinan (-0,5095).
- d. Berdasarkan hasil perhitungan indeks komposit dengan menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja APBD, terindikasi bahwa kualitas pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Mimika selama tahun 2018-2021 masih sangat kurang. Fakta ini ditunjukkan dengan kecenderungan nilai kualitasnya masih dibawah 90%, yaitu di tahun 2018 sebesar 72,92 poin, tahun 2019 sebesar 79,17 poin, tahun 2020 sebesar 77,08 poin, dan tahun 2021 sebesar sebesar 75,00. Sebagian besar faktor-faktor yang menyebabkan kualitas APBD Mimika selama ini terkategori rendah atau kurang adalah penetapan APBD yang belum tepat waktu, tingkat kemandirian fiskal sangat rendah, alokasi belanja modal kurang, alokasi belanja pendidikan belum memenuhi mandatory spending, belanja daerah kurang efektif mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

2. Saran-Saran

- a. Prinsip efisiensi anggaran daerah harus mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika. Prinsip efisiensi ini harus diupayakan melalui penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagaimana telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Tahap-tahapan perencanaan dan penganggaran perlu lebih dioptimalkan, terutama dalam hal penyusunan RKPD, KUA/PPAS, RKA-SKPD dan Draf Rancangan APBD.
- c. Azas-azas transparansi perlu diatur secara tegas dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur transparansi proses dan pelaksanaan program/kegiatan serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan kalangan akademis dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektifitas pelaksanaan APBD melalui berbagai kajian akademis yang ilmiah dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Provinsi Papua dan Pusat KEUDA UNCEN. (2017). Laporan Analisis Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Penganggaran Di Provinsi Papua. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Jayapura.
- BPK RI. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Kota Jayapura.
- BPS Provinsi Papua. (2022). Papua Dalam Angka Tahun 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura.
- Daryanto, A., dan Hafizrianda, Y. (2010). Metode Kuantitatif Untuk Perencanaan Pembangunan. IPB-Press, Bogor.
- Halim, A. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Heriwibowo, D. (2016). Kajian Kualitas Belanja Daerah: Dinamika Dan Pengukurannya Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Indrawati, S. M. (2022). Menkeu Dengan Tegas Minta Kementerian Lembaga Lakukan Spending Better. Warta Ekonomi, PT Obor Sarana Utama, Jakarta.
- Juanda, B., *et al.* (2013). Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah. Bidang Desentralisasi Fiskal Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
- Kuncoro, H. (2019). Menelaah Belanja Daerah RAPBN 2020. Media Indonesia Group, Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Putra, Y.S., *et al.* (2018). Strategi Peningkatan Kualitas Belanja Daerah Provinsi Banten. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Vol. (10), No. (Khusus) : hlm. 1-13.
- Susetyo, I. B., *et al.* (2014). Kualitas Anggaran Dan Belanja Daerah Terhadap Penyediaan Pelayanan Masyarakat Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Studi Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol (2), No (3) : hlm. 511-517.
- Widodo, S. (2020). Efisiensi & Efektivitas Belanja Pegawai, Barang & Modal. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.
- Wahyuni, S., *et al.* (2017). Kualitas Belanja Daerah Dan Hubungannya Dengan Kinerja Pembangunan Di Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol (6), No (2) : hlm. 16-31.